

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji Prakoso, Sution Usman, Djoko Pramono, 1991, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Amir M.S, 1989, *Ekspor Impor, Teori dan Penerapannya*, Jakarta: PT. Pustaka Bianaman Pressindo.
- H.M.N. Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Djambatan.
- Herman, A.Carel, Lawalata, 1983, *Pelabuhan dan Niaga Pelayaran*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muchtarudin Siregar, 1992, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*, Jakarta: LPEE Universitas Indonesia.
- Muchtarudin Siregar, 1990, *Manajemen Pengangkutan*, Jakarta: Berdikari Student's study Club Union.
- R. Soekardono, 1969, *Hukum Perkapalan Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Soedjono, Wiwoho, 1982, *Hukum Pertanggungans Laut*, Jakarta: Bina Aksara.
- Soedjono, Wiwoho, 1987, *Hukum Pengangkutan Laut di Indonesia dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty.
- Soegijatna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sudarsono, 1994, *Operasi Peti Kemas Dan Pertanggungannya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suyono R.P, 2003, *Pengangkutan Intermodal Ekspor dan Impor Melalui Laut*, Jakarta: PPM.
- Wiwoho Soedjono, 1982, *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut*, Jakarta: Bina Aksara.
- Wiwoho Soedjono, 1983, *Sarana-sarana Penunjang Pengangkutan Laut*, Jakarta: Bina Aksara.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

RI, Undang-Undang No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

RI, Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan,

Inpres No.4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut,

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 146/MPP/Kep/4/1999 tanggal 22 April 1999 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.

Surat Keputusan Menteri Perhubungan No.KM 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal.

Surat Keputusan Menteri Perhubungan No.67 KM Tahun 1999, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrasi Pelabuhan.

